

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN PENYUSUNAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DI RUAS JALAN PROVINSI JURUSAN PARSOBURAN - BORBOR - RIANIATE - GAROGA DI KABUPATEN TAPANULI UTARA

Uraian Pendahuluan

- 1. Latar Belakang** : Jalan merupakan prasarana transportasi yang memiliki peranan penting dalam perkembangan sosial ekonomi suatu wilayah. Pada tahap awal, infrastruktur jalan mampu membuka keterisolasian daerah untuk mendorong pertumbuhan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Pada tahap berikutnya infrastruktur jalan akan dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Selain itu jalan juga berperan penting dalam hal pertahanan dan keamanan serta mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh keberadaan infrastruktur di daerah tersebut. Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang memiliki peranan penting dalam perkembangan wilayah karena mampu membuka keterisolasian daerah dan merupakan urat nadi perekonomian.

Keberadaan jalan mampu mengatasi berbagai kesulitan dalam pemasaran hasil pertanian daerah yang sebelumnya sulit dipasarkan. Dukungan infrastruktur ini sanggup mengatasi tuntutan pertumbuhan ekonomi, selain itu jalan juga berperan penting mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa.

Untuk menjawab tuntutan pembangunan ini, Provinsi Sumatera Utara telah melakukan pembangunan Jalan Ruas Jalan Provinsi Jurusan Parsoburan - Borbor - Rianiate - Garoga di Kabupaten Tapanuli Utara sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/30/KPTS/2012, tanggal 19 Januari 2012 tentang Penetapan Ruas – Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi dan telah diperbaharui dengan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/673/KPTS/2018, tanggal 8 Juni 2018 tentang Penetapan Ruas Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Di Provinsi Sumatera Utara.

Dalam hal ini Ruas Jalan Provinsi Parsoburan – Borbor – Rianiate - Garoga adalah sepanjang 60 km dengan kondisi existing permukaan jalan berupa hotmix dengan kondisi lebar jalan $\pm 3,5 - 6,0$ m, telah dilakukan pembangunan Jalan di beberapa titik km sesuai dengan kebutuhan kondisi jalan yang tersedia.

Setelah menjadi status Jalan Provinsi, pembangunan dan pemeliharaan pada ruas jalan Provinsi Jurusan Parsoburan - Borbor - Rianiate - Garoga di Kabupaten Tapanuli Utara dilakukan secara periodik oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, namun belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup.

Sehingga dalam melaksanakan pembangunan jalan tersebut diperlukan Dokumen Lingkungan Hidup dengan berpedoman kepada Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor : 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 04 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantaun Lingkungan Hidup, pada Lampiran I Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Bidang Pekerjaan Umum Kota Sedang Panjang Jalan 5 km dengan pengadaan tanah > 30 Ha atau Luas Pengadaan Tanah > 30 Ha wajib menyusun Dokumen Lingkungan Hidup berupa AMDAL.menyusun Dokumen Lingkungan Hidup berupa AMDAL.

Selanjutnya untuk kegiatan yang sudah beroperasi tetapi belum memiliki dokumen lingkungan hidup, maka berdasarkan peraturan tersebut menjelaskan setiap kegiatan Orang Perorangan atau Badan Usaha yang usaha dan/atau kegiatannya telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan namun belum memiliki Dokumen Lingkungan Hidup untuk segera menyusun Dokumen Lingkungan Hidup berupa Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) bagi usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL UPL.

Berkaitan dengan hal tersebut, Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum sebagai institusi teknis berencana melakukan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup di Ruas Jalan Provinsi Jurusan Parsoburan - Borbor - Rianiate - Garoga di Kabupaten Tapanuli Utara yang disusun sesuai dengan Tata cara penyusunan dan penilaian Dokumen Lingkungan Hidup berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kerangka Acuan Kerja (yang selanjutnya disebut KAK) ini disusun sebagai acuan bagi para Konsultan dalam rangka mengikuti proses pengadaan jasa.

2. Maksud dan Tujuan : Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup di Ruas Jalan Provinsi Jurusan Parsoburan - Borbor - Rianiate - Garoga di Kabupaten Tapanuli Utara dimaksudkan untuk melakukan suatu kajian mengenai dampak dan evaluasi potensi dampak yang akan timbul dari kegiatan Ruas Jalan Provinsi Parsoburan – Borbor – Rianiate - Garoga terhadap lingkungan hidup yang ada di areal sekitar lokasi kegiatan.

Tujuan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup di Ruas Jalan Provinsi Jurusan Parsoburan - Borbor - Rianiate - Garoga di Kabupaten Tapanuli Utara adalah tersedianya dokumen kajian ilmiah lingkungan sebagai acuan dalam melakukan operasional sehingga berjalan aman, efektif dan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dapat diminimalisasi.

- 3. Sasaran** : - Tersedianya dokumen pengelolaan lingkungan yang berisi kejelasan tentang dampak dan potensi dampak terhadap lingkungan di lokasi terkait kegiatan operasional jalan serta kendala yang mungkin akan ditemui dan solusi terhadap kendala tersebut. Dokumen Lingkungan Hidup dibuat agar dapat bermanfaat untuk memperlancar kegiatan transportasi darat.
- Tersedianya pedoman dan saran tindakan dalam menjaga dan mempertahankan kelestarian lingkungan di wilayah kegiatan dan sekitarnya.
- Menekan dampak negatif dan megembangkan dampak positif dari kegiatan pembangunan jalan.
- Terpenuhinya amanat UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021.
- 4. Lokasi Pekerjaan** : Lokasi kegiatan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup terletak di Ruas Jalan Provinsi Parsoburan – Borbor – Rianiate - Garoga
- 5. Sumber Pendanaan** : Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024.
- 6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen** : Nama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) : Saib Pandapotan Harahap, S.T., M.T.
- Nama Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : Edison P. Togatorop, S.T., M.T.
- Organisasi Perangkat Daerah (OPD) : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara

Data Penunjang

- 7. Data Dasar** : Status Jalan Provinsi Sumatera Utara, dengan total Panjang 60 km dan lebar jalan $\pm 3,5 - 6,0$ m, Jenis Permukaan Badan Jalan Hotmix dan Tanah
- 8. Standar Teknis** : Standar Nasional Indonesia (SNI), Standar/Kriteria Perencanaan (KP) yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan Standar lainnya yang berlaku.
- 9. Studi-Studi Terdahulu** : -
- 10. Referensi Hukum** : Referensi Hukum yang berlaku untuk pekerjaan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup yaitu :

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelengaran Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2021 tentang jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup;
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.65/Menlhk/Stjen/Kum.1/7/2016 Tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 102 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup Untuk Kegiatan/dan usaha Yang telah Memiliki Izin Usaha/dan atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan;
- Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 48 tahun 1996 tentang Baku Mutu Tingkat Kebisingan;
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037;

11. Lingkup Pekerjaan

Ruang Lingkup

: Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup di Ruas Jalan Provinsi Jurusan Parsoburan - Borbor - Rianiate - Garoga di Kabupaten Tapanuli Utara, sesuai Dengan Permintaan kondisi Lapangan, dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

1. Tahap Persiapan. Pada tahap persiapan ini dilakukan kegiatan-kegiatan :
 - a. Pengumpulan data-data sekunder diantaranya peta RTRW (Provinsi Sumatera Utara), peta Kawasan Hutan, dan lain-lain.
 - b. Survey pendahuluan untuk melihat kondisi eksisting lokasi rencana kegiatan untuk penentuan lingkup wilayah studi.
 - c. Pengumuman pada lokasi kegiatan tentang rencana penyusunan dokumen lingkungan baik dalam bentuk papan pengumuman atau pertemuan/diskusi di lokasi kegiatan.
 - d. Pengecekan mengenai ijin prinsip kegiatan oleh instansi yang berwenang.
 - e. Pengecekan (validasi) dan Pengurusan Permohonan Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang pada instansi yang berwenang. Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (overlay) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan yang berlaku sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).
2. Pengambilan Sampel dan Analisis Laboratorium Kualitas Air, kualitas udara dan kebisingan dan survey flora fauna (biota dan flora fauna terrestrial)
3. Pengambilan data sosial, budaya, ekonomi dan Kesehatan lingkungan dan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan dalam bentuk kuisioner maupun pengumpulan data sekunder.
4. Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup terkait kegiatan Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, mencakup beberapa uraian sebagai berikut :
 - a. Deskripsi kegiatan, ruang lingkup kegiatan dan batas wilayah kegiatan

- b. Kajian evaluasi dampak kegiatan .
1. Komponen kegiatan yang menimbulkan dampak atau sebagai sumber dampak.
 2. Jenis, parameter, sifat penting dan besaran dampak yang ditimbulkan dari kegiatan .
 3. Analisa Data-data kondisi rona lingkungan atau kondisi eksisting lingkungan yang berpotensi terkena dampak yang terdiri dari :
 - I. Komponen Lingkungan/Fisik Kimia
 - Iklim
 - Topografi & Geomorfologi
 - Tata Guna Lahan & Tata Ruang
 - Kualitas Udara Ambient
 - Tingkat Kebisingan
 - Kualitas Air Permukaan
 - II. Komponen Flora Fauna Kehutanan
 - Biota Perairan
 - Analisa Vegetasi
 - Inventarisasi Flora Fauna Darat
 - III. Komponen Sosial /Ekonomi Budaya
 - Demografi
 - Sosial Ekonomi
 - Sosial Budaya
 - IV. Komponen Kesehatan Lingkungan/Masyarakat
 - Fasilitas Kesehatan
 - Sanitasi Lingkungan
 - K3
 - Vektor/Prapelensi Penyakit
 - V. Komponen Teknik Sipil/Jalan Raya
 - Bangkitan Tarikan kendaraan
 - Geometrik Jalan
 - Struktur dan sarana Jalan

4. Baku mutu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
 5. Upaya pengelolaan dan pemantauan yang telah direncanakan atau telah dilakukan.
- c. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) diuraikan dan dilengkapi matrik yang berisi :
1. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang mencakup dampak dan sumber dampak;
 2. Tolok ukur dampak, untuk mengukur komponen yang terkena dampak berdasarkan baku mutu standar;
 3. Tujuan rencana pengelolaan lingkungan hidup;
 4. Upaya pengelolaan lingkungan hidup;
 5. Lokasi kegiatan pengelolaan lingkungan (peta, sketsa, gambar);
 6. Periode pengelolaan lingkungan yang memuat kapan dan berapa lama kegiatan pengelolaan dilaksanakan;
 7. Institusi pengelolaan lingkungan hidup, yang memuat: Pelaksana yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan lingkungan dan Pengawas pengelolaan lingkungan.
- d. Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) diuraikan dan dilengkapi matrik yang berisi :
1. Dampak yang ditimbulkan dari kegiatan yang mencakup dampak dan sumber dampak,
 2. Parameter lingkungan hidup yang dipantau
 3. Tujuan rencana pemantauan lingkungan hidup
 4. Metode pemantauan lingkungan hidup, yang memuat :
 - Metode pengumpulan dan analisis data;
 - Lokasi pemantauan lingkungan hidup;
 - Jangka waktu dan frekuensi pemantauan.
 5. Institusi pemantauan lingkungan hidup, yang memuat :
 - Pelaksana yang bertanggungjawab melaksanakan pemantauan lingkungan;
 - Pengawas pemantauan lingkungan

12. Keluaran : Keluaran dari kegiatan ini adalah Dokumen Lingkungan Hidup di Ruas Jalan Provinsi Parsoburan – Borbor – Rianiate - Garoga

13. Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen :

- a. Laporan dan Data
Kumpulan laporan dan data sebagai hasil studi terdahulu yang terkait dengan pekerjaan ini dapat dipakai sebagai referensi oleh penyedia jasa;
- b. Staff Pengawas/Pendamping
Pengguna jasa akan mengangkat petugas atau wakilnya yang bertindak sebagai pengawas atau pendamping (counterpart) dalam rangka pelaksanaan pekerjaan konsultansi;

- c. Fasilitas yang disediakan oleh Pengguna Jasa yang dapat digunakan oleh penyedia jasa :
- Dukungan administrasi dan surat menyurat.
 - Dalam hal konsultasi rutin dengan pihak-pihak terkait atau direksi pekerjaan, penyedia jasa dapat menggunakan ruang rapat yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sumatera Utara.

- 14. Peralatan dan Material dari Penyedia Jasa Konsultasi** : Fasilitas berikut harus disediakan oleh penyedia jasa untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan di lapangan :
- Kantor lengkap dengan peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan seperti : komputer beserta printer, kamera digital, peralatan tulis dan barang-barang yang habis pakai lainnya.
 - Biaya perjalanan dinas untuk tenaga ahli di lapangan.
 - Fasilitas transportasi termasuk kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan kendaraan bermotor roda 2 (dua) yang layak untuk inspeksi lapangan beserta pengemudinya.
 - Keperluan biaya sosial dan pengobatan selama pekerjaan lapangan di lokasi Proyek sudah termasuk di dalam Biaya Langsung Personil.

- 15. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa** : Batasan Kegiatan Konsultan adalah :
- Penyedia jasa berwenang untuk melaksanakan jasa konsultasi maupun mengadakan barang yang sesuai dengan kontrak.
- Penyedia jasa berwenang untuk tidak melakukan kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia.
- Seluruh hasil yang diperoleh dari pekerjaan perencanaan ini harus dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan dari prosedur tersebut maka Pengguna Jasa/Tim Evaluasi berhak memerintahkan Penyedia Jasa Konsultasi untuk melakukan pekerjaan ulang dan hal ini menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Penyedia Jasa Konsultasi.

Sebelum melaksanakan kegiatan, konsultan dapat membuat suatu kriteria perencanaan. Kriteria tersebut dapat dipresentasikan dalam bentuk draft pada pengguna jasa untuk mendapatkan persetujuan. Persetujuan atas kriteria desain tersebut tidak serta merta menghilangkan tanggung jawab konsultan perencana terhadap kecukupan persyaratan teknis perencanaan.

Kriteria desain memuat hal-hal berikut :

- Rencana kerja dan rencana data survey;
- Metoda survey dan pengumpulan data yang dilakukan;
- Kriteria-kriteria lainnya yang dianggap perlu.

- 16. Jangka Waktu Penyelesaian Pekerjaan** : Jangka waktu pelaksanaan tugas konsultan penyusun dokumen lingkungan hidup selama 4 bulan (120 hari kalender).

17. Kualifikasi Penyedia Jasa : Perusahaan Kecil dengan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Kode Sub Kualifikasi KL 401 Jasa Konsultansi / RK005 Jasa Rekayasa Lainnya KBLI 71102

18. Personil : Penyedia jasa wajib memahami dan menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tim Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup minimal mempunyai sertifikasi kompetensi AMDAL 1 (satu) orang KTPA dan 2 (dua) orang ATPA.

Posisi	Kualifikasi	Jumlah	
		Orang	Bulan
Team Penyusun Dokumen Lingkungan Hidup :			
A. Ketua Team/ Team Leader	S1/S2 Lingkungan/ Teknik Lingkungan Pengalaman 7 Tahun untuk pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan atau sejenis. <u>Memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) /Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) minimal Madya Teknik Lingkungan/ dan atau Memiliki sertifikat Kompetensi Penyusun AMDAL/KTPA dengan tanda registrasi yang masih berlaku.</u>	1	4
B. Anggota Team : 1. Ahli Lingkungan/ Fisik Kimia	S1/S2 Kimia/ Fisika/ Teknik Lingkungan/Ilmu Lingkungan . Pengalaman minimal 5 Tahun untuk pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan hidup atau sejenis/memiliki tanda registrasi kompetensi yang masih berlaku	1	4

2. Ahli Sosial Ekonomi dan Budaya	S1/S2 Ilmu Sosial/ Ekonomi/Antropologi. Pengalaman minimal 5 Tahun untuk pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan hidup atau sejenis/memiliki tanda registrasi kompetensi yang masih berlaku	1	3
3. Ahli Jalan Raya	S1/Setara Teknik Sipil. Pengalaman minimal 5 Tahun untuk pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan hidup atau sejenis/memiliki Sertifikat Kompetensi Amdal/ SKA Ahli Muda	1	2.5
4. Ahli Flora Fauna /Kehutanan	S1/Setara Biologi/ Pertanian/Kehutanan. Pengalaman minimal 5 Tahun untuk pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan hidup atau sejenis/memiliki tanda registrasi kompetensi yang masih berlaku .	1	2.5
5. Ahli Kesehatan Masyarakat/ Kesehatan Lingkungan	S1/S2 Kesehatan Masyarakat /Kesehatan Lingkungan. Pengalaman minimal 5 Tahun untuk pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan hidup atau sejenis/memiliki tanda registrasi kompetensi yang masih berlaku.	1	2.5

Tenaga Pendukung			
1. Tenaga Ahli Surveyor	Minimal pendidikan D3 dan memiliki pengalaman minimal 2 Tahun dibidangnya.	1	2
2. Tenaga Administrasi	Minimal pendidikan D3-Ekonomi/Teknik Lingkungan dan memiliki pengalaman minimal 3 Tahun dibidangnya.	1	4
3. Operator Komputer	Minimal pendidikan SMK/Sederajat dan memiliki pengalaman minimal 3 Tahun dibidangnya.	1	4

Catatan:

Setiap Tenaga Ahli yang ditugaskan dalam pekerjaan ini harus memenuhi persyaratan/dan memiliki :

- a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- b. Tanda bukti penyelesaian wajib pajak (SPT Tahunan) Tahun 2023
- c. Lulusan PT. Negeri atau Swasta yang telah Lulus Ujian Negara, atau perguruan tinggi luar negeri yang ijazahnya telah disahkan/diakui oleh Instansi Pemerintah yang berwenang di bidang pendidikan tinggi,
- d. Pengalaman kerja personil dibuktikan dengan melampirkan Referensi Kerja yang dikeluarkan oleh Instansi terkait.

Tugas dan Tanggung Jawab Team Penyusun Dokumen Lingkungan Hidup:

- A. Team Leader / Ketua Tim / KTPA
Team Leader/Ketua Tim/KTPA ini menguasai proses pengumpulan data, menguasai masalah yang berkaitan dengan lingkungan terutama dalam hal pemecahan permasalahan lingkungan dan mampu membuat skenario dari aspek kajian tersebut serta dapat bekerjasama dengan tenaga ahli lainnya dalam pelaksanaan pekerjaan, pembuatan produk akhir serta diskusi atau presentasi/seminar/sosialisasi nantinya.

Tugas dan tanggung jawabnya adalah:

1. Mampu melakukan koordinasi secara terpadu baik di tingkat internal proyek maupun kepada instansi yang terkait dengan pekerjaan tersebut
2. Mampu memantau semua kemajuan kegiatan yang diselenggarakan oleh tim
3. Bertanggung jawab terhadap semua hasil pekerjaan baik mengenai pelaporan maupun di lapangan
4. Melakukan penelitian dan analisis lingkungan
5. Pengambilan data lapangan yang berhubungan dengan lingkungan
6. Menganalisis dampak lingkungan pada suatu daerah

7. Mampu melakukan koordinasi secara terpadu baik di tingkat internal proyek maupun kepada instansi yang terkait dengan pekerjaan tersebut

B. Ahli Sosial Ekonomi dan Budaya

S1/Setara Ilmu Sosial/Ekonomi/Lingkungan/Antropologi. Pengalaman 5 Tahun. Memiliki Sertifikat Kompetensi Ketua/Anggota Tim Penyusun AMDAL (KTPA/ATPA) dan tanda registrasi yang masih berlaku/Memiliki Sertifikat Pelatihan Amdal.

Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah :

1. Melakukan penelitian pelingkupan bidang sosial, ekonomi budaya
2. Menentukan isu pokok bidang sosial, ekonomi budaya
3. Mengidentifikasi interaksi kegiatan terhadap komponen sosial, ekonomi budaya
4. Melakukan analisis dan tabulasi data kuesioner dan data sekunder untuk mendapatkan rona awal lingkungan komponen sosial, ekonomi budaya
5. Memprakirakan dampak penting yang timbul akibat rencana kegiatan terhadap komponen sosial, ekonomi budaya
6. Mengevaluasi dampak penting bidang sosial, ekonomi budaya
7. Merumuskan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan bidang sosial, ekonomi budaya
8. Membantu Team Leader dalam pembuatan laporan di bidang sosial, ekonomi budaya
9. Membantu Team Leader dalam menyusun seluruh produk yang dibutuhkan mulai dari tahapan persiapan seluruh lapangan sampai menyiapkan seluruh laporan yang dibutuhkan.

C. Ahli Fisik-Kimia

S1/Setara Ilmu Kimia/Fisika/Lingkungan/Teknik Lingkungan. Pengalaman 5 Tahun. Memiliki Sertifikat Kompetensi Ketua/Anggota Tim Penyusun AMDAL (KTPA/ATPA) dan tanda registrasi yang masih berlaku/Memiliki Sertifikat.

Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah:

1. Mempersiapkan survey Fisik-Kimia beserta pelaporannya
2. Bersama dengan Ketua Tim/Team Leader melakukan survey dan penyusunan laporan sebagaimana diatur dalam Kerangka Acuan Kerja
3. Melakukan asistensi, diskusi dan pembahasan-pembahasan yang diperlukan
4. Menyelesaikan laporan-laporan/dokumen-dokumen sesuai dengan kerangka acuan kerja
5. Membantu Team Leader dalam pembuatan laporan di bidang Fisik-Kimia
6. Membantu Team Leader dalam menyusun seluruh produk yang dibutuhkan mulai dari tahapan persiapan seluruh lapangan sampai menyiapkan seluruh laporan yang dibutuhkan

D. Ahli Flora Fauna Kehutanan

S1/Setara Biologi/Pertanian/Kehutanan. Pengalaman 5 Tahun. Memiliki Sertifikat Kompetensi Ketua/Anggota Tim Penyusun AMDAL (KTPA/ATPA) dan tanda registrasi yang masih berlaku/Memiliki Sertifikat Pelatihan Amdal.

Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah:

1. Melakukan pelingkupan bidang biologi terestrial dan perairan
2. Mengidentifikasi interaksi kegiatan terhadap komponen biologi terestrial dan perairan
3. Menentukan isu pokok lingkungan bidang biologi terestrial dan perairan
4. Melakukan analisis sampel biologi untuk mendapatkan roma awal lingkungan komponen biologi terestrial dan perairan
5. Memprakirakan dampak penting yang timbul akibat rencana kegiatan Pembangunan terhadap komponen lingkungan biologi terestrial dan perairan
6. Mengevaluasi dampak penting bidang biologi terestrial dan perairan
7. Merumuskan rancana pengelolaan dan pemantauan lingkungan bidang biologi terestrial dan perairan
8. Membantu Team Leader dalam pembuatan laporan di bidang biologi
9. Membantu Team Leader dalam menyusun seluruh produk yang dibutuhkan mulai dari tahapan persiapan seluruh lapangan sampai menyiapkan seluruh laporan yang dibutuhkan

E. Ahli Kesehatan Masyarakat

S1/Setara Kesehatan Masyarakat. Pengalaman minimal 5 Tahun dalam melaksanakan pekerjaan terkait.

Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah:

1. Melakukan penelitian dan analisis bidang kesehatan masyarakat
2. Pengambilan data lapangan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat
3. Menganalisis kesehatan masyarakat pada suatu daerah/lingkungan
4. Membantu Team Leader dalam pembuatan laporan di bidang kesehatan masyarakat
5. Membantu Team Leader dalam menyusun seluruh produk yang dibutuhkan mulai dari tahapan persiapan seluruh lapangan sampai menyiapkan seluruh laporan yang dibutuhkan

F. Ahli Jalan Raya

S1/Setara Teknik Sipil. Pengalaman minimal 5 Tahun. Memiliki Sertifikat Kompetensi Ketua/Anggota Tim Penyusun AMDAL (KTPA/ATPA) dan tanda registrasi yang masih berlaku/ Memiliki Sertifikat Pelatihan Amdal.

Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah :

1. Melakukan penelitian dan analisis bidang sipil
2. Pengambilan data lapangan yang berhubungan dengan sipil
3. Menganalisis bidang sipil pada suatu daerah/lingkungan
4. Membantu Team Leader dalam pembuatan laporan di bidang sipil
5. Membantu Team Leader dalam menyusun seluruh produk yang dibutuhkan mulai dari tahapan persiapan seluruh lapangan sampai menyiapkan seluruh laporan yang dibutuhkan.

Tugas dan Tanggung Jawab Tenaga Pendukung :

Adapun tugas dan tanggung jawab tenaga pendukung seperti Operator Komputer, Surveyor, dan Tenaga Administrasi adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap seluruh pekerjaan yang diberikan oleh Team Leader maupun Tenaga Ahli lainnya yang terlibat dalam pekerjaan ini
2. Bertanggung jawab terhadap seluruh kelengkapan data dan proses administrasi yang akan menunjang kelancaran kerja tenaga ahli
3. Bertanggung jawab terhadap seluruh kelengkapan data dan proses analisis serta kegiatan yang akan menunjang kelancaran kerja tenaga ahli

a) Operator Komputer

Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- 1) Mengedit data laporan yang telah terkumpul
- 2) Menjadi notulensi pada seminar teknis dan komisi
- 3) Mempersiapkan data khususnya yang berkaitan dengan gambar-gambar dan peta-peta lokasi
- 4) Membuat gambar-gambar dan peta-peta bagi kebutuhan penyusunan laporan berdasarkan hasil survey di lapangan
- 5) Mempersiapkan data administrasi dan menyusun kegiatan asistensi

b) Surveyor

Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- 1) Menghimpun data kegiatan sekunder dan data primer lapangan
- 2) Melakukan sampling di lapangan
- 3) Ikut melakukan sosialisasi di lapangan serta menghimpun data primer maupun sekunder
- 4) Mempersiapkan data survey lapangan
Bertanggung jawab kepada tenaga ahli dan team leader dalam mengumpulkan dan menyusun seluruh hasil survey yang didapat di lapangan.

c) Tenaga Administrasi

Adapun tugas dan tanggung jawabnya adalah:

- 1) Membuat laporan pekerjaan
- 2) Membuat arsip dan pendokumentasian kegiatan
- 3) Membuat berita acara dari mulai awal pekerjaan sampai pada akhir pekerjaan

19. Pelaporan :

1. Draft Final Dokumen Lingkungan

Draft ini harus didiskusikan kepada pihak pemberi jasa sebelum didiskusikan kepada Tim Teknis Penilai Dokumen Lingkungan Hidup atau Instansi terkait/Dinas Lingkungan Hidup.

Laporan diserahkan sebanyak 35 (tiga puluh lima) buku .

2. Dokumen Lingkungan Final

Dokumen Lingkungan Hidup yang telah diperiksa oleh tim teknis Dinas Lingkungan terkait yang dibuktikan dengan berita acara pemeriksaan. Laporan ini diserahkan sebanyak 10 (sepuluh) buku laporan.

3. Seluruh Dokumen Final format PDF dalam Harddisk Eksternal Kapasitas 500GB sebanyak 1 unit.

Hal-Hal Lain

- 20. Produksi dalam Negeri** : Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dillakukan didalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.
- 21. Persyaratan Kerjasama** : Jika kerjasama dengan penyedia jasa konsultansi lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi :
- Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
 - Ketentuan-ketentuan dalam kerjasama dengan sub penyedia harus megacu kepada harga yang tercantum dalam kontrak serta menganut sistem penyetaraan.
 - Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia.
 - Masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan pekerjaan.

- 22. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan** : Pengumpulan data lapangan harus memenuhi persyaratan berikut : Mengacu pada SNI dan Standar lainnya yang berlaku.
- 23. Alih Pengetahuan** : Jika diperlukan, Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) harus mengadakan diskusi dan rapat terkait dengan substansi pelaksanaan pekerjaan yang akan diberikan kepada staf Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- 24. Kesehatan dan Keselamatan Kerja** :
 - Dalam pelaksanaan kegiatan jasa konsultansi, penyedia jasa wajib menerapkan sistem manajemen K3 dan menyusun Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K).
 - Keluaran yang dihasilkan dalam kegiatan jasa konsultansi harus mencakup aspek-aspek K3
- 25. Biaya & Rab** : Biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar Rp. 693.438.534,- (*Enam Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Empat Rupiah*).
- 26. Penutup** : Konsultan Penyusun Dokumen Lingkungan Hidup setelah menerima pengarahan penugasan dan semua bahan masukan, hendaknya memeriksa dan memproses semua bahan yang ada serta mencari bahan masukan lain yang dibutuhkan untuk pekerjaan penyusunan dokumen ini.
- Untuk kesempurnaan pekerjaan penyusunan dokumen lingkungan hidup tersebut di atas Konsultan Penyusun diminta mempelajari segala informasi dan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan pekerjaan penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup dimaksud.

Medan, Februari 2024

**BIDANG PERENCANAAN
KUASA PENGGUNA ANGGARAN**



SAB PANDAPOTAN HARAHAP, S.T., M.T.
NIP. 19691127 199703 1 006